

OPTIMALISASI PEMAHAMAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP ALUR REMISI DAN PROGRAM INTEGRASI SOSIAL MELALUI SOSIALISASI DAN MEDIA INFORMASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU

Fregina Pingkan Oktavio¹, Lulu Angghita Kusuma Ningrum², Naniek Pangestuti³

freginapingkan9@gmail.com¹, luluakn26@gmail.com², naniekedi14@gmail.com³

Politeknik Imigrasi Dan Pemasyarakatan Indonesia Jurusan Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak: Pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai alur pemberian remisi dan program integrasi sosial merupakan faktor penting dalam mendukung terpenuhinya hak-hak WBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, masih terdapat WBP yang belum memahami secara menyeluruh persyaratan, tahapan, serta mekanisme pengusulan remisi dan program integrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman WBP melalui kegiatan sosialisasi dan penyediaan media informasi mengenai alur remisi dan integrasi sosial. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta pelaksanaan sosialisasi kepada WBP. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyampaian materi secara langsung yang didukung media informasi mampu meningkatkan pemahaman WBP mengenai dasar hukum, persyaratan administratif dan substantif, tahapan pengusulan, serta mekanisme pemberian remisi dan program integrasi sosial. Selain itu, media informasi yang ditempatkan pada area strategis Lapas memberikan akses informasi yang berkelanjutan sehingga WBP dapat memahami kembali prosedur yang berlaku secara mandiri. Dengan demikian, sosialisasi yang dipadukan dengan media informasi terbukti menjadi strategi edukasi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum WBP serta mendukung transparansi pelayanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Kata Kunci: Remisi, Integrasi Sosial, Warga Binaan Pemasyarakatan, Sosialisasi, Media Informasi.

Abstract: Prisoners' understanding of remission procedures and social reintegration programs is essential to ensuring the fulfillment of their legal rights in accordance with applicable regulations. Based on observations conducted at Bengkulu Class IIA Correctional Institution, many inmates were found to have limited understanding of the requirements, procedures, and stages involved in obtaining remission and participating in social reintegration programs. This study aims to improve inmates' understanding through educational outreach and the provision of information media explaining the remission and social reintegration process. The study employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, documentation, and educational activities as data collection methods. The findings indicate that direct educational sessions supported by information media significantly improved inmates' understanding of the legal basis, administrative and substantive requirements, application procedures, and implementation mechanisms of remission and social reintegration programs. Furthermore, the information media placed in strategic locations within the correctional institution provided continuous access to accurate information, enabling inmates to independently review the procedures whenever needed. Therefore, combining educational outreach with information media is an effective strategy for enhancing legal literacy among inmates and promoting transparent correctional services at Bengkulu Class IIA Correctional Institution.

Keywords: *Remission, Social Reintegration, Correctional Inmates, Educational Outreach, Information Media.*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan yang bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak WBP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak tersebut adalah memperoleh remisi dan program integrasi sosial bagi WBP yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Remisi dan integrasi sosial merupakan bentuk penghargaan atas perilaku baik serta keberhasilan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Namun, berdasarkan hasil observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, masih terdapat WBP yang belum memahami secara menyeluruh mengenai persyaratan, prosedur, dan tahapan pengusulan remisi maupun program integrasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta menghambat penyampaian informasi mengenai hak-hak WBP.

Sebagai bentuk kontribusi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dilakukan inovasi melalui kegiatan sosialisasi yang didukung media informasi mengenai alur remisi dan integrasi sosial. Penyediaan media informasi diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh WBP. Melalui inovasi ini, informasi mengenai persyaratan, tahapan, dan mekanisme pengusulan remisi serta integrasi dapat tersampaikan secara lebih sistematis dan efektif.

Pelaksanaan inovasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman WBP mengenai alur remisi dan program integrasi sekaligus mendukung transparansi pelayanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Selain memberikan manfaat bagi WBP, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif media edukasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan informasi di lingkungan pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan inovasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan, penyusunan media informasi, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi hasil kegiatan.

Tahap identifikasi permasalahan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan petugas Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik) serta beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masih terdapat WBP yang belum memahami persyaratan, prosedur, dan tahapan pemberian remisi serta program integrasi.

Berdasarkan hasil tersebut, disusun media informasi yang memuat alur remisi dan integrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi kepada WBP dengan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, persyaratan administratif dan substantif, tahapan pengusulan, serta mekanisme

pemberian remisi dan integrasi. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat pemahaman dan partisipasi WBP selama pelaksanaan sosialisasi serta tanggapan dari petugas pemasyarakatan terhadap kebermanfaatan media informasi yang telah disediakan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan efektivitas inovasi yang dilaksanakan dalam mendukung penyampaian informasi mengenai hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu diawali dengan kegiatan observasi lapangan serta koordinasi bersama petugas Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai mekanisme pemberian remisi dan program integrasi. Sebagian WBP belum memahami secara utuh persyaratan administratif dan substantif, tahapan pengusulan, maupun alur proses hingga diterbitkannya keputusan pemberian hak tersebut.

Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan munculnya berbagai pertanyaan yang berulang kepada petugas mengenai waktu pemberian remisi, syarat memperoleh integrasi, dokumen yang diperlukan, serta tahapan yang harus dilalui sebelum usulan disampaikan kepada instansi yang berwenang. Kondisi ini mengakibatkan proses penyampaian informasi menjadi kurang efektif karena petugas harus memberikan penjelasan yang sama secara berulang kepada WBP yang berbeda.

Selain itu, penyampaian informasi yang selama ini lebih banyak dilakukan secara lisan memiliki keterbatasan. Informasi yang disampaikan pada saat tertentu tidak selalu dapat diingat oleh seluruh WBP, terutama bagi WBP yang baru menjalani masa pidana atau tidak mengikuti kegiatan penyuluhan sebelumnya. Akibatnya, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai prosedur pemberian remisi dan integrasi sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap pelayanan pemasyarakatan.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya suatu media informasi yang mampu menyajikan alur remisi dan integrasi secara sederhana, sistematis, serta mudah dipahami oleh seluruh WBP. Dengan tersedianya media informasi yang dapat diakses setiap saat, penyampaian informasi diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan pemasyarakatan.

Inovasi Yang Dilaksanakan

Sebagai bentuk kontribusi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tim KKN mengembangkan inovasi berupa penyusunan media informasi mengenai alur pemberian remisi dan program integrasi. Media informasi tersebut disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan prosedur resmi yang diterapkan di lingkungan pemasyarakatan.

Penyusunan media informasi diawali dengan mempelajari regulasi mengenai remisi dan integrasi, kemudian mengidentifikasi tahapan-tahapan penting yang perlu diketahui oleh WBP. Informasi tersebut selanjutnya disusun

dalam bentuk alur yang sistematis menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh WBP tanpa mengurangi substansi dari ketentuan yang berlaku.

Setelah media informasi selesai disusun, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi kepada WBP. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai pengertian remisi dan integrasi, dasar hukum, persyaratan administratif dan substantif, tahapan pengusulan, hingga proses penerbitan keputusan pemberian hak. WBP juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sehingga kegiatan berlangsung secara interaktif. Setelah sosialisasi selesai, media informasi ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh WBP sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi secara berkelanjutan.

Hasil Pelaksanaan Inovasi

Pelaksanaan inovasi menunjukkan bahwa media informasi yang disertai kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap pemahaman WBP mengenai remisi dan integrasi. Selama kegiatan berlangsung, WBP menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait persyaratan, waktu pengusulan, maupun mekanisme pemberian hak. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketertarikan WBP untuk memahami hak-haknya selama menjalani masa pidana.

Media informasi juga memberikan kemudahan bagi petugas dalam menyampaikan informasi karena alur pemberian remisi dan integrasi telah tersaji secara runtut dan mudah dipahami. WBP dapat melihat kembali informasi tersebut kapan saja tanpa harus menunggu adanya kegiatan sosialisasi berikutnya. Dengan demikian, penyampaian informasi menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi kesalahan pemahaman terhadap prosedur yang berlaku.

Dari sisi pelayanan, inovasi ini turut mendukung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pasyarakatan. Informasi mengenai persyaratan, tahapan, serta mekanisme pemberian remisi dan integrasi dapat diketahui secara terbuka oleh seluruh WBP sehingga mengurangi munculnya persepsi yang keliru mengenai proses pemberian hak. Ketersediaan media informasi juga membantu menciptakan pelayanan yang lebih informatif, akuntabel, dan mudah diakses.

Pembahasan

Inovasi penyediaan media informasi mengenai alur remisi dan integrasi merupakan salah satu bentuk optimalisasi pelayanan informasi di lingkungan pasyarakatan. Keberadaan media informasi berfungsi sebagai sarana edukasi yang melengkapi penyampaian informasi secara lisan sehingga proses komunikasi antara petugas dan WBP menjadi lebih efektif. Penyajian informasi dalam bentuk alur memudahkan WBP memahami setiap tahapan yang harus dilalui sebelum memperoleh hak remisi maupun integrasi.

Pelaksanaan sosialisasi yang didukung media informasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang bersifat visual lebih mudah dipahami dibandingkan penyampaian secara lisan saja. WBP dapat mempelajari kembali informasi yang telah diberikan sehingga pemahaman terhadap prosedur menjadi lebih baik. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik yang menekankan pentingnya akses informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh penerima layanan.

Secara keseluruhan, inovasi yang dilaksanakan selama kegiatan KKN memberikan manfaat tidak hanya bagi WBP, tetapi juga bagi petugas pasyarakatan. Bagi WBP, inovasi ini meningkatkan pemahaman mengenai hak-

haknya sehingga mampu mengurangi kesalahpahaman terkait mekanisme pemberian remisi dan integrasi. Sementara itu, bagi petugas, media informasi menjadi sarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, inovasi ini berpotensi untuk diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pelaksanaan inovasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu melalui kegiatan sosialisasi dan penyediaan media informasi mengenai alur remisi dan program integrasi memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Permasalahan utama yang ditemukan sebelum pelaksanaan inovasi adalah masih terbatasnya pemahaman WBP mengenai persyaratan, tahapan, dan mekanisme pemberian remisi serta program integrasi, sehingga sering menimbulkan pertanyaan berulang dan kesalahpahaman terhadap prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan sosialisasi memberikan kesempatan kepada WBP untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai hak-hak pemasyarakatan, sedangkan media informasi berfungsi sebagai sarana edukasi yang dapat diakses secara berkelanjutan. Kombinasi kedua inovasi tersebut mampu mendukung penyampaian informasi yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman WBP, serta memperkuat transparansi pelayanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Saran

Inovasi berupa kegiatan sosialisasi dan penyediaan media informasi mengenai alur remisi dan program integrasi diharapkan dapat terus dimanfaatkan sebagai salah satu sarana edukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Keberlanjutan pelaksanaan sosialisasi secara berkala serta pembaruan media informasi sesuai dengan perkembangan regulasi diharapkan mampu semakin memperkuat kualitas penyampaian informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Selain itu, inovasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu praktik baik (best practice) dalam mendukung pelayanan informasi yang transparan, mudah dipahami, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak WBP. Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan antara petugas pemasyarakatan dan berbagai pihak, kualitas pelayanan informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu diharapkan semakin optimal serta mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). *Pedoman penyelenggaraan sistem pemasyarakatan*. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti*

Bersyarat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. (2026). Pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

Soekanto, S. (2019). Sosiologi suatu pengantar (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-3). Alfabeta.

Wibowo, P. (2023). Sistem pemasyarakatan Indonesia: Konsep dan implementasi. Deepublish.